



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Respon Iran dalam Menghadapi Ancaman Kepentingan  
Nasionalnya Terkait Konflik di Suriah 2011-2017**

Skripsi

Oleh

Felicia Lusiana Tjandra

2013330160

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

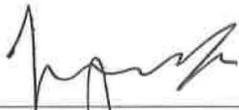


**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Felicia Lusiana Tjandra  
Nomor Pokok : 2013330160  
Judul : Respon Iran dalam Menghadapi Ancaman Kepentingan Nasionalnya  
Terkait Konflik di Suriah 2011-2017

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 8 Agustus 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

**Sekretaris**  
Dr. I Nyoman Sudira

: 

**Anggota**  
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Felicia Lusiana Tjandra  
NPM : 2013330160  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Respon Iran dalam Menghadapi Ancaman Kepentingan Nasionalnya Terkait Konflik di Suriah 2011-2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Agustus 2018



Felicia Lusiana Tjandra

## Abstrak

Nama : Felicia Lusiana Tjandra  
NPM : 2013330160  
Judul : Respon Iran dalam Menghadapi Ancaman Kepentingan Nasionalnya  
Terkait Konflik di Suriah 2011-2017

---

Dalam situasi konflik di Suriah, banyaknya aktor yang berkecimpung dalam konflik menjadi salah satu pemicu konflik Suriah. Aktor internasional yang bergabung dalam konflik Suriah memiliki kepentingan yang hendak dicapai. Tidak terkecuali Iran. Sebagai kawan lama Suriah, Iran menjadi pendukung utama kubu pemerintah Suriah, rezim Bashar al-Assad. Meskipun Iran dan Suriah sudah beraliansi sejak tahun 1982, keterlibatan Iran dalam konflik di Suriah tidak lepas dari pemenuhan kepentingan nasionalnya. Iran meyakini bahwa mempertahankan pemerintahan Assad di Suriah adalah salah satu cara Iran untuk bertahan di tengah isolasi dari negara-negara Arab dalam kawasan Timur Tengah. Selain itu, bangkitnya kelompok-kelompok radikal di Suriah juga mengancam kondisi keamanan Iran dalam teritorialnya.

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan respon-respon Iran sebagai bentuk keterlibatannya pada konflik di Suriah. Penulis menggunakan teori Neo-Realism Kenneth N. Waltz dan menjelaskan kerangka kepentingan nasional Iran melalui konsep *national interest* dari Donald E. Nuechterlein. Melalui kerangka tersebut, penulis juga menganalisa intensitas kepentingan Iran dalam konflik di Suriah. Penelitian dengan metode kualitatif dan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan media, menemukan bahwa keterlibatan Iran dalam konflik di Suriah ditunjukkan melalui tindakan dukungan finansial dan kemiliteran terhadap pemerintah Suriah, menjadi negara penjamin perundingan damai Perjanjian Astana, membangun proyek rekonstruksi di Suriah dan menandatangani kerjasama ekonomi dengan Suriah.

Kata kunci : Iran, kepentingan nasional Iran, konflik Suriah, aliansi, respon Iran.

## ***Abstract***

*Name* : Felicia Lusiana Tjandra  
*NPM* : 2013330160  
*Title* : *Iran's Responses against Threats to Its National Interests regarding Syrian Conflict 2011-2017*

---

*In a conflict in Syria, huge number of actors involved became one of the triggers that led to a protracted conflict condition. International actors who join the Syrian conflict were believed to have interests to be achieved. Iran is no exception. As a long-time Syrian ally, Iran has become a major supporter of the Syrian government, the regime of Bashar al-Assad. Although Iran and Syria have been pledged to align since 1982, Iran's involvement in the conflict in Syria should be considered to have a fulfillment of its national interests. Iran believes by maintaining Assad's regime in Syria would be the only way for Iran to survive from antagonism among the Arab countries in the Middle East region. In addition, the rise of radical groups in Syria also threatens Iran's security in its territory.*

*The aim of this research is to describe Iranian responses as a form of its involvement to the protracted conflict in Syria. The author uses Neo-Realism theory by Kenneth N. Waltz and explains the framework of Iran's national interest through the concept of national interest by Donald E. Nuechterlein. Through this framework, the author also analyzes the intensity of Iran's interests to the conflict. By using qualitative methods and literature studies through books, journals, and media, the author found that Iran's involvement in the conflict in Syria was demonstrated through the actions of financial and military aid to the Syrian government, becoming one of the state guarantors of the peace talks in the Astana Agreement, building reconstruction projects in Syria and signing joint economic agreement with Syria.*

*Keywords* : *Iran's national interests, Syrian conflict, alliance, Iran's responses.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Yesus Kristus, atas berkat dan rahmat-Nya yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dr. I Nyoman Sudira, dan Mba Jessica Martha, atas kesediaannya menerima *si “baong”* ini beserta kekurangan saya selama proses pembuatan penelitian ini. Serta para penguji yang meluluskan saya, Mas Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A., dan Mas Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kriteria dan persyaratan kelulusan pada jenjang strata satu untuk Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Melalui penelitian ini, penulis berharap untuk dapat memberi wawasan tambahan bagi rekan-rekan yang tertarik mengenai studi konflik dan perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama dalam mempelajari konflik Suriah beserta pihak-pihak yang terlibat. Karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran sangat terbuka bagi penulis untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik.

Bandung, 30 Juli 2018.

Felicia Lusiana Tjandra

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	1
<i>Abstract</i> .....	2
KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR GAMBAR .....	6
DAFTAR TABEL .....	7
BAB I .....	9
PENDAHULUAN .....	9
1.1. Latar Belakang Masalah .....	9
1.2. Identifikasi Masalah .....	11
1.2.1. Deskripsi Masalah .....	11
1.2.2. Pembatasan Masalah .....	15
1.2.3. Pertanyaan Penelitian .....	15
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	16
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	16
1.4. Kajian Literatur .....	16
1.5. Kerangka Pemikiran .....	19
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data .....	22
1.6.1. Metode Penelitian .....	22
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data .....	23
1.7. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II .....	25

DINAMIKA KONFLIK SURIAH DAN KEPENTINGAN IRAN .....	25
2.1    Dinamika Konflik di Suriah.....	25
2.1.1    Rezim Bashar al-Assad .....	34
2.1.2    Keterlibatan Aktor Internasional.....	38
2.2    Arah Kebijakan Iran.....	45
2.3    Kepentingan Nasional Iran .....	50
2.3.1    Aliansi Iran dengan Suriah.....	52
2.3.2    Serangan Bom Bunuh Diri ISIL 2017 di Tehran .....	57
2.4    Kerjasama Ekonomi dan Nilai Perdagangan Iran dengan Suriah .....	58
BAB III.....	62
RESPON IRAN TERHADAP KONFLIK DI SURIAH.....	62
3.1    Memberikan Bantuan Militer dan Finansial terhadap Rezim Suriah.....	64
3.1.1    Pengerahan Pasukan IRGC <i>Ground Forces</i> (IRGC-GF) .....	66
3.1.2    Pengerahan Tentara Nasional Iran (Artesh) .....	67
3.1.3    Pengerahan Pasukan Asing Syiah dan Hizbullah.....	68
3.1.4    Dukungan Finansial terhadap Kemiliteran Suriah .....	70
3.2    Menjamin Kesepakatan Zona De-eskalasi Konflik melalui Perjanjian Astana.....	71
3.3    Membangun Proyek Rekonstruksi bersama Suriah .....	80
3.3.1    Pembangunan Kereta Jalur Iran hingga ke Laut Mediterania .....	81
3.3.2    Sumber Daya dan Minyak.....	81
3.4    Menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi bersama Suriah .....	82
3.5    Tingkat Intensitas Kepentingan Iran dalam Konflik di Suriah .....	86
BAB IV .....	90
KESIMPULAN .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Peta Persebaran Daerah Kekuasaan Kelompok-kelompok .....	30
Gambar 2.2 Peta Persebaran Pangkalan Militer Russia .....	43
Gambar 2.3 Daftar Instalasi Militer AS di Timur Tengah .....	47
Gambar 2.4 Grafik Nilai Perdagangan Iran dengan Suriah 2007-2017 .....	60

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Intensitas kepentingan Iran dalam konflik di Suriah .....	89
---	----

## DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
FSA	: <i>Free Syrian Army</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
IDP	: <i>Internally Displaced Person</i>
IRGC	: <i>Iran Revolutionary Guard Corps</i>
IRGC-QF	: <i>Iran Revolutionary Guard Corps Quds Force</i>
ISIL	: <i>Islamic State of Iraq and The Levant</i>
ISW	: <i>Institute Study of War</i>
JAN	: Jabhat al-Nusra
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OPCW	: <i>Organization for the Prohibition of Chemical Weapons</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PEA	: Persatuan Emirat Arab
PYD	: <i>Democratic Union Party</i>
PYG	: <i>People's Defense Unit</i>
SANA	: <i>Syrian Arab News Agency</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika pola interaksi yang terjadi di Timur Tengah, tidak jarang ditemukan adanya aliansi yang tidak biasa, termasuk Iran dan Suriah. Iran dan Suriah memegang predikat sebagai aliansi yang berbeda di kawasan Timur Tengah. Suriah memperkenalkan dirinya sebagai negara sekuler di tengah dunia Arab, sedangkan Iran—setelah revolusi Iran di tahun 1979—menggambarkan dirinya sebagai negara dengan religiusitas yang tinggi. Sebagai wujud dari kereligiusannya yang tinggi, sejak revolusi Iran, pemimpin tertinggi Iran adalah seseorang yang memiliki gelar Ayatulloh. Iran sebagai negara di kawasan Timur Tengah yang rakyatnya didominasi oleh Syiah harus bertahan di tengah dunia Arab yang didominasi oleh Sunni.<sup>1</sup>

Di bawah kepemimpinan Ayatulloh Khomeini, Iran merubah arahan kebijakannya. Iran yang semula bermaksud memelihara budaya Persia, berubah menjadi negara Islam yang kuat. Dalam semalam, kudeta yang terjadi pada waktu Revolusi Iran 1979 menyebabkan negara yang pada awalnya mendukung negara Barat menjadi republik yang rakyatnya meyakini ideologi religius secara universal. Iran sebelumnya memiliki aliansi cukup lama dengan AS dan Israel. Namun, aliansi tersebut terpaksa diakhiri dengan adanya perubahan kepemimpinan Iran. Akibatnya, hubungannya dengan negara-

---

<sup>1</sup> Daniel L. Byman. Brookings. "Syria and Iran: What's Behind the Enduring Alliance?" diakses dari <https://www.brookings.edu/opinions/syria-and-iran-whats-behind-the-enduring-alliance/>, pada Juni 2018.

negara Arab sebagai pendukung AS pun terhenti. Seiring dengan perubahan kebijakan Republik Islam Iran, berubah pula hubungan aliansi dan musuh Iran.<sup>2</sup>

Memasuki tahun 2011, ledakan pemberontakan Arab *Spring* berhasil menjatuhkan rezim-rezim pemerintahan di negara-negara Timur Tengah, di antaranya adalah Tunisia, Yaman, Mesir, dan Libya. Berbagai penyebab terjadinya diaspora Arab *Spring* berakar dari isu domestik negara-negara Timur Tengah, seperti minimnya pengaplikasian prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi yang buruk, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, kesenjangan pendidikan terhadap masyarakat yang termarginalisasi dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Diawali oleh pemberontakan di Tunisia, Arab *Spring* menyebabkan perubahan pola kawan dan lawan dalam keamanan regional Timur Tengah.

Tahun 2011 juga, di saat Suriah mengalami konflik yang dianggap sebagai cikal bakal revolusi dari Arab *Spring*, keyakinan tersebut dibantah oleh Bashar al-Assad. Dengan kepercayaan dirinya, Bashar al-Assad mengungkapkan bahwa negaranya tidak akan bernasib sama seperti Tunisia, Mesir dan Libya yang terkena dampak Arab *Spring*. Bertahannya rezim Assad hingga kini memasuki tahun yang ketujuh, adalah hasil dari bantuan Iran dan Russia di berbagai aspek yang dapat disebut sebagai aliansinya.

Suriah awalnya adalah negara yang sekuler, yang menghargai toleransi antar umat beragama. Meskipun negara menyaksikan reformasi dari ajaran kelompok Sunni di Suriah, kesekuleran Suriah masih tetap terlihat.<sup>4</sup> Dalam perundang-undangan Suriah tahun 1950 dan 1953, keduanya menuliskan dengan jelas bahwa kebebasan dalam

---

<sup>2</sup> Jubin Goodarzi. *Syria and Iran Diplomatic Alliance and Power Politics in the Middle East* (London: Tauris Academic Studies, 2006), hal. 11.

<sup>3</sup> Academic Peace Orchestra Middle East, "The Arab Spring Its Impact on the Region and on the Middle East Conference," Policy Brief For the Middle East Conference on A Wmd/Dvs Free Zone, (2012), hal. 1.

<sup>4</sup> Line Khatib, "More religious yet still secular?" *Syrian Secularism Intellectual and Organizational Narratives*, Vol. 8, No.1, (Februari 2016), hal. 42.

beragama dan memilih kepercayaan dijamin oleh konstitusi selama tidak mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Partai Ba'ath merupakan partai yang memiliki pengaruh besar di Suriah dengan mazhab sekularisme garis kerasnya. Partai Ba'ath yang mendominasi perpolitikan di Suriah bermaksud menjaga kesekuleran negara yang cukup plural ini. Sebagai presiden Suriah sejak tahun 2000, Bashar al-Assad pada awalnya diharapkan membawa perbaikan pada perpolitikan di Suriah. Bashar al-Assad diharapkan dapat menggantikan cara kepemimpinan ayahnya yang otoriter.

Di tengah ricuhnya kondisi konflik di Suriah, keterlibatan aktor internasional memiliki andil besar dalam membuat konflik menjadi berlarut. Dimensi konflik Suriah yang memiliki banyak komponen membuat Suriah menjadi negara yang hampir gagal. Namun, tidak seperti kudeta yang terjadi di Libya, hingga saat ini rezim Suriah masih dapat bertahan karena adanya bantuan internasional pula. Sebagai negara *less power*, Suriah digandeng oleh Iran dan Russia sebagai aliansi yang terkuat untuk mempertahankan rezimnya dan mengatasi konflik yang telah diintervensi oleh aktor besar internasional seperti AS.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Deskripsi Masalah**

Perlawanan rakyat Suriah yang pro-demokrasi terhadap rezim Assad berawal dari peristiwa protes segelintir remaja pada bulan Maret 2011 di Kota Deraa, Suriah. Mereka melukis tembok-tembok sekolahnya dengan slogan-slogan revolusioner yang tentunya tidak disukai pemerintah. Kemudian remaja-remaja tersebut ditangkap dan disiksa. Pasukan keamanan pemerintah menembak para demonstran yang berujung pada terbunuhnya nyawa beberapa orang. Berangkat dari peristiwa itu, para pemberontak

oposisi pemerintah menyuarakan permintaan Assad untuk turun dari jabatannya dengan mengangkat senjata pula untuk melindungi dirinya dan mengusir militer pemerintah.<sup>5</sup>

Tahun 2011 merupakan maraknya ledakan Arab *Spring* di kawasan Timur Tengah. Arab *Spring* memberikan semangat revolusi demokrasi yang menolak rezim otoriter di mayoritas Timur Tengah. Konflik Suriah yang berujung pada *civil war* di Suriah menjadi salah satu isu keamanan di Timur Tengah. Peperangan antara oposisi dan pemerintah meluas dan saling melakukan baku hantam. Oposisi Suriah menunjukkan pergerakan yang meluas namun dengan kekuatan yang terfragmentasi. Kelompok identitas yang bergabung juga termasuk kaum Kurdi di dalamnya yang dikhawatirkan dapat membangkitkan semangat kaum Kurdi lainnya di Turki dan Irak. Sikap ofensif dari pemerintah dengan langkah kekerasan semakin memicu terbentuknya pasukan oposisi bersenjata. Disebutkan ada pasukan FSA dan bergabungnya kelompok jihad ke kubu oposisi seperti Ahrar al-Sham dan JAN. Pada awalnya, Barat merasa ragu untuk mendukung sehingga aliran dana dukungan tidak jelas diterima oleh kelompok mana.

Tahun 2013, masuklah ISIL dengan kedok Jabhat al-Nusra (JAN). Merapatnya ISIL ke kubu oposisi pemerintah Suriah, menambah kekacauan konflik. Bashar al-Assad dituduh sebagai rezim teroris dan diktator dengan harapan pemerintah Suriah kehilangan kepercayaan rakyatnya dari rakyat yang moderat dan negara-negara Barat di tahun 2011. Memanfaatkan propaganda tersebut, ISIL masuk dan bergabung dalam kelompok oposisi. Bersama JAN—organisasi anakan Al-Qaeda—*Islamic Front*, Partai Islam Turki dan

---

<sup>5</sup> “Enam hal yang mengubah perang Suriah,” BBC News, 22 Maret 2017, diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39276182>, pada tanggal 24 September 2017.

Jaish al-Fatah (JaF), ISIL bergabung dengan kelompok teroris tersebut dan seharusnya bertanggung jawab terhadap serangkaian kekacauan yang terjadi di Suriah.

ISIL dengan ideologi Takfirinya menumpas habis siapapun yang berlawanan paham dengannya. Oposisi yang dikatakan merupakan pemberontakan moderat malahan bekerja sama dengan kelompok-kelompok teroris di atas yang menjunjung tinggi kekhalifahan. Seperti misalnya pimpinan atau petinggi *Free Syrian Army* (FSA), Abdel Jabbar el-Okaidi mengaku dalam bekerja FSA erat kaitannya dengan ISIL.<sup>6</sup>

Kondisi Suriah menurut pandangan negara-negara Barat menitikberatkan pada sebuah rezim otoriter, tidak lain berhubungan dengan kepentingan Barat, yakni penyebaran demokrasi. Mereka mencampurtangani konflik di negara Suriah alih-alih menyelamatkan mayoritas kaum Sunni dari kekejaman rezim Bashar al-Assad yang adalah seorang Alawi.<sup>7</sup> Disebutkan bahwa militer pemerintahan Bashar al-Assad menargetkan dan membunuh warga sipil. Namun sebaliknya, warga Suriah menyaksikan sendiri bagaimana teroris memporakporandakan kota-kota di Suriah dan memusnahkan masyarakat bersama NATO sebagai bantuan pasukan pemberontakan rezim Assad.

Meskipun kelompok teroris oleh masyarakat internasional sering disebut sebagai pihak oposisi—karena masuknya ISIL melalui pemberontakan oposisi pemerintah—dan kaum Sunni, namun yang terjadi di dalam perpolitikan Suriah sesungguhnya adalah para oposisi inilah yang mengabaikan umat Islam dari tahun 2011. Tentara Suriah memang

---

<sup>6</sup> Tim Anderson, *The Dirty War on Syria Washington, Regime Change and Resistance*, Centre for Research on Globalization (CRG). (Montreal: Global Research Publisher. 2016), hal. 9

<sup>7</sup> Ibid, hal. vii.

melawan secara brutal terhadap kaum teroris, namun berbeda dengan propaganda yang digaungkan Barat, mereka melindungi warganya.<sup>8</sup>

Beberapa negara *great powers* berharap dapat “menghentikan konflik” dengan menggulingkan pemerintahan Assad. Apabila upayanya gagal mereka dapat membangun perpecahan poros negara-negara independen di kawasan Timur Tengah.<sup>9</sup> Sumbu perlawanan tersebut termasuk di dalamnya adalah Hizbullah, Suriah dan Iran. Irak—yang notabene masih trauma terhadap intervensi AS dan akibatnya—memulai kecenderungannya untuk bergabung dalam blok tersebut. Russia sebagai salah satu *great powers* turut mendukung perlawanan Suriah. Pada akhirnya, keberhasilan perlawanan Suriah merupakan berakhirnya pula agenda AS terhadap “negara boneka” di Timur Tengah.

Meskipun pertemanan Iran dan Suriah telah berlangsung sejak tahun 1979, baru di tahun 2011 keterlibatan Iran meningkat secara signifikan, termasuk di antaranya peningkatan bantuan kemiliteran kepada pemerintah Suriah semenjak pecahnya konflik di Suriah. Iran pun banyak memberikan pelatihan terhadap tentara pemerintah Suriah, tidak sedikit juga Iran mengirimkan pasukannya untuk terlibat dalam membantu tentara pemerintah Suriah. Bahkan telah tercatat, sebanyak delapan jenderal pasukan Iran terbunuh dalam peperangan di Suriah.<sup>10</sup>

Iran sebagai *regional powers* dalam sumbu perlawanan turut terlibat secara signifikan dalam mempertahankan rezim Assad. Usaha Iran untuk mempertahankan

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. viii.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Garret Nada. The Iran Primer. “Part I: Iran in Syria,” diakses dari <http://iranprimer.usip.org/blog/2018/apr/10/iran-syria-part-1>, pada 2 Juni 2018.

Assad diyakini memiliki agenda tersendiri yang berhubungan dengan kepentingan nasionalnya. Bentuk aliansi dengan Suriah ini memperlihatkan bahwa Iran merasa kepentingan keamanan negaranya ikut terancam. Maka Iran harus terus mengupayakan pertahanan rezim Assad untuk tidak tertinggal di antara konflik Sunni dan Syiah di kawasan Timur Tengah. Terlebih lagi, intensitas kehadiran AS yang tinggi dalam konflik di Suriah menyebabkan Iran semakin merasa terancam karena meningkatnya *power* musuh Iran di Timur Tengah, yakni negara-negara Teluk lainnya dan Israel.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi oleh beberapa poin berikut. Dari segi waktu, meledaknya konflik di Suriah dipicu oleh pemberontakan melawan rezim Suriah. Selain itu, penelitian ini menjelaskan respon *regional power*, yaitu Iran dalam konflik di Suriah. Intervensi aktor internasional pun menjadi salah satu ancaman yang mengganggu kepentingan Iran di Suriah. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus menggambarkan respon Iran yang didasari oleh kepentingannya terhadap konflik di Suriah dari tahun 2011-2017.

### **1.2.3. Pertanyaan Penelitian**

Melihat dukungan Iran yang begitu besar dalam konflik di Suriah, penulis bermaksud mendeskripsikan peran Iran sebagai *regional powers* dalam memenuhi kepentingannya di Suriah. Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis memiliki pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: ***“Bagaimana respon Iran dalam menghadapi ancaman kepentingan nasionalnya terkait konflik di Suriah?”***

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan keterlibatan Iran dalam konflik di Suriah, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan respon Iran dalam menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya yang berkaitan dengan konflik di Suriah. Respon Iran tersebut dijelaskan berdasarkan pendeskripsian kepentingan Iran dan langkah-langkah Iran dalam campur tangannya menghadapi konflik di Suriah.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan berguna bagi rekan-rekan yang tertarik mengenai studi keamanan khususnya pada kajian di kawasan yang penuh konflik seperti Timur Tengah. Penulis berharap kajian mengenai respon Iran dalam menanggapi ancaman kepentingan nasionalnya terkait konflik di Suriah dapat menggambarkan peran Iran sebagai aliansi Suriah dalam *axis of resistance* di Timur Tengah.

### **1.4. Kajian Literatur**

Dalam menyusun permasalahan penelitian mengenai Suriah ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian masalah ini dan sebagai perbandingan dalam penelitian. Pertama, penulis penelitian Abdul Hamid Al Eed Al-Moussawi dengan judul *Iran and the Syrian Crisis*. Kedua, penulis menggunakan penelitian Kenneth Katzman, seorang pakar Timur Tengah dalam *Congressional Research Service* yang berjudul *Iran's Foreign and Defense Policy*.

Al-Moussawi dalam penelitiannya memaparkan bahwa dukungan Iran terhadap rezim Suriah merupakan keputusan yang tegas yang diambil Iran. Konflik Suriah semakin

keruh dengan adanya campur tangan aktor regional dan internasional. Iran, sebagai aktor regional, bersama dengan Russia dan beberapa kelompok dari Irak bersama-sama mendukung rezim Assad dengan totalitas. Keputusan Iran dalam mendukung rezim Assad di Suriah adalah untuk melindungi kepentingan Iran pula. Namun Al-Moussawi mempertanyakan apakah bantuan tersebut akan berdampak pada berakhirnya konflik di Suriah.<sup>11</sup>

Penelitian Al-Moussawi diawali dari keterlibatan Iran dalam *Arab Spring*. Iran memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menanggapi *Arab Spring*. Dalam penelitiannya, Al-Moussawi menunjukkan bahwa Iran mendukung revolusi yang terjadi di Mesir, Libya dan Tunisia. Sedangkan pada negara Suriah, Bahrain dan Yaman, Iran memiliki reaksi yang berbeda yang disesuaikan dengan kepentingannya. Menurut penelitian Al-Moussawi, hal tersebut dilandasi oleh motivasi “kebangkitan Islam” yang diteruskan dari revolusi Iran 1979, untuk menanamkan nilai-nilai revolusi terhadap negara yang melakukan revolusi *Arab Spring*.<sup>12</sup>

Selanjutnya Al-Moussawi memaparkan penelitiannya mengenai bentuk dukungan Iran terhadap Suriah. Bentuk dukungan yang dijelaskan adalah dukungan politik, militer dan ekonomi terhadap rezim Suriah.<sup>13</sup> Penelitian Al-Moussawi membantu penulis dalam penelitian ini. Namun, Al-Moussawi tidak memaparkan secara detil tindakan Iran pada keterlibatannya dalam konflik di Suriah.

---

<sup>11</sup> Abdul Hamid Al Eed Al-Moussawi. “Iran and the Syrian Crisis,” *Journal of US-China Public Administration*, (David Publishing: 2017) hal. 136-137

<sup>12</sup> Ibid, hal. 137-138.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 139-141.

Dalam penelitian Kenneth Katzman, beliau memaparkan landasan-landasan motivasi dan ideologi dalam menentukan arahan kebijakan keamanan Iran. Katzman berpendapat bahwa peran Khomeini sebagai *supreme leader* Iran atau pemimpin agung Iran berperan penting dalam menentukan arahan kebijakan negara. Katzman juga menyertakan temuan kebijakan keamanan Iran terutama dalam bidang militer terhadap negara-negara dalam kawasan Timur Tengah dan kawasan lainnya di dalam penelitiannya.<sup>14</sup>

Selain itu, Katzman juga menulis mengenai respon-respon kekuatan besar aktor internasional seperti AS dan Russia dalam menanggapi kebijakan keamanan Iran di negara-negara Timur Tengah. Hal yang digarisbawahi dalam penelitian ini adalah Katzman menjelaskan bahwa pemerintahan Iran berusaha mengambil keuntungan dari keterlibatannya dalam konflik-konflik regional untuk mengubah struktur dan menangkakl kekuasaan yang berpihak pada AS, Israel, Arab Saudi dan negara-negara Sunni lainnya.<sup>15</sup>

Dalam menjabarkan kebijakan keamanan Iran, Katzman juga menjelaskan mengenai dukungan Iran terhadap aliansi-aliansinya termasuk Hizbullah, Suriah, Hamas, dan kelompok-kelompok Syiah di Timur Tengah. Namun, Katzman menjelaskan pula karena ideologi Iran tidak berdasarkan kepentingan sectarian, maka Iran juga membantu pembebasan Palestina karena hubungan antagonismenya dengan Israel. Selain hubungan dan dukungan aliansi militer dan finansial, Katzman menyertakan pula pengembangan nuklir Iran dan respon negara-negara lain dan PBB terhadap aktivitas pengembangan

---

<sup>14</sup> Kenneth Katzman. "Iran's Foreign and Defense Policies," *Congressional Research Service* (2018), hal. 20.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 1-4.

nuklir Iran.<sup>16</sup> Jurnal ini membantu penulis dalam memaparkan kebijakan-kebijakan keamanan Iran terhadap Suriah.

Dari kedua penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa penelitian tersebut belum menyentuh fokus penelitian penulis. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis berusaha melengkapinya penelitian-penelitian di atas mengenai respon Iran sesuai kepentingan-kepentingannya dalam konflik di Suriah.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisa respon Iran dalam konflik di Suriah, penulis menggunakan perspektif Neo-realisme dari Kenneth N. Waltz. Neo-realisme menekankan pada konsep struktur anarki dan *balance of power* yang ditunjukkan melalui tindakan-tindakan negara sebagai aktornya. Anarki ditunjukkan melalui ketiadaan institusi atau otoritas yang lebih tinggi dari negara untuk mengatur negara lainnya.<sup>17</sup> Waltz meyakini akan adanya *politics in the absence of government*. Sedangkan *balance of power* ditunjukkan melalui kekuatan (*power*) yang dimiliki suatu negara untuk menjaga stabilitas sistem.

Negara sebagai aktor rasional memiliki beragam kepentingan yang akan dicapai dengan cara-cara yang rasional pula. Salah satu kepentingan utamanya adalah untuk melindungi dirinya dari ancaman dengan meningkatkan kemampuan bertahan hidupnya (*survivability*).<sup>18</sup> Upaya sebuah negara untuk bertahan hidup dalam sebuah struktur didefinisikan sebagai prinsip *self-help*. Prinsip *self-help* menunjukkan bahwa negara dapat mempertahankan dirinya dalam keadaan minimal dan mendominasi di dalam sistem

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 7-18.

<sup>17</sup> Robert Jervis, "Cooperation under Security Dilemma," *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (Cambridge University Press, 1978), hal. 169-170.

<sup>18</sup> Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (Long Grove, Illinois: Waveland Press, 1979), hal.

dalam keadaan maksimalnya. Maka dari itu, negara akan berupaya dengan segala cara untuk mencapai kepentingannya, di antaranya adalah melalui upaya internal—berkaitan dengan peningkatan kapasitas ekonomi, militer dan strategisnya, dan upaya eksternal yakni dengan memperluas aliansinya dan melemahkan pihak lawannya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai respon Iran dalam menghadapi konflik di Suriah. Respon dapat berbentuk aksi, reaksi militer, sikap diplomatik, ide atau gagasan, doktrin/ideologi, tindakan baik persuasif maupun kooperatif, strategi non-blok, dan sebagainya selama hal tersebut berkaitan dengan konteks nasional yang berorientasi ke luar negeri. Sebuah respon juga dapat berarti adanya reaksi yang harus dilakukan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di dunia luar.<sup>20</sup>

Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari Donald E. Nuechterlein untuk mendefinisikan kepentingan Iran dalam konflik di Suriah. Nuechterlin membagi konsep kepentingan nasional menjadi beberapa kelompok. Empat kepentingan tersebut adalah kepentingan ideologi, pertahanan (*defence*), ekonomi, dan tatanan regional atau internasional (*world order*).<sup>21</sup>

Kepentingan ideologi didefinisikan sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai yang secara universal oleh sebuah negara-bangsa dipercayai baik adanya. Seringkali nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang tertinggi dari sebuah negara sehingga tindakan negara—berdasarkan moral tersebut—tersebut dianggap negara lain sebagai tindakan

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 118.

<sup>20</sup> I.G.Wahyu Wicaksana, “A Guide to Theory”: Epistemologi Politik Luar Negeri”. *Global dan Strategis*, Th I, No. 1 (2007) hal. 12-19.

<sup>21</sup> Donald E. Nuechterlein, “National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-making,” *British Journal International Studies*, Vol. 2, No. 3, (Cambridge University Press: 1976), hal. 248.

yang arogan dan licik.<sup>22</sup> Kedua adalah kepentingan pertahanan. Kepentingan pertahanan atau *defence* meliputi perlindungan terhadap negara dan rakyatnya dari ancaman fisik negara lain dan/atau ancaman eksternal terhadap kedaulatan pemerintahan. Selain kedua kepentingan tersebut, Nuechterlein menyebutkan adanya kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya dalam membangun hubungan dengan negara lain. Terakhir, Nuechterlin mendefinisikan kepentingan tatanan dunia atau *world orders* sebagai tujuan untuk memelihara kestabilan sistem politik internasional dan ekonomi sehingga rakyatnya dapat merasa aman bahwa segala tindakannya terjamin meski berada di luar batas wilayahnya.<sup>23</sup>

Untuk menganalisa tingkat intensitas suatu negara dalam keterlibatannya terhadap isu internasional, Nuechterlin menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah jarak dari perbatasan negara tersebut, komposisi pemerintahannya, banyaknya perdagangan yang dilakukan, sejarah hubungan antar negara tersebut, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Nuechterlin membagi intensitas kepentingan keterlibatan suatu negara pada isu internasional dalam tingkatan yang berbeda, diantaranya adalah tingkatan bertahan hidup (*survival*), vital, utama (*major*) dan *peripheral*.<sup>24</sup>

Intensitas kepentingan tersebut dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah isu bertahan hidup (*survival*). Isu bertahan hidup memiliki karakteristik yang jelas ditunjukkan dari adanya ancaman yang bersifat segera atau *urgent* dan adanya serangan fisik besar-besaran oleh negara lain. Nuechterlein menyatakan bahwa hanya

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

kepentingan pertahanan yang masuk definisi isu bertahan hidup sebuah negara. Kedua adalah isu vital. Isu kedua ini berpotensi menyebabkan kerusakan atau kerugian yang serius bila tidak ditangani dengan tindakan yang sepadan—termasuk menggunakan kekuatan militer, untuk mengatasi atau menghambat peningkatan ancaman tersebut. Isu ini dapat memasuki dimensi kepentingan pertahanan, ekonomi maupun tatanan internasional—berkaitan dengan aliansi dan martabat nasional, dan beberapa kasus dalam kepentingan ideologi. Ketiga adalah isu utama (*major*). Pada tingkatan ini, isu tersebut berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan ideologi dari suatu negara sehingga pemerintah harus mendefinisikan sejauh mana isu tersebut menyerang kepentingan negaranya dengan menentukan aksi untuk menghindari peningkatan bahaya yang dapat dialami. Biasanya pada isu utama ini, negara akan mengupayakan tindakan diplomasi untuk mengatasinya. Ancaman tersebut akan meningkat menjadi vital bila diplomasi gagal mengatasinya. Terakhir adalah isu *peripheral*. Isu *peripheral* berdampak pada urusan privat penduduk negaranya dan perusahaan-perusahaan multinasionalnya yang beroperasi di luar batas wilayah negaranya.<sup>25</sup>

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian penelitian kualitatif. Penggambaran penelitian menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat menunjukkan tindakan-tindakan Iran sebagai implementasi dari kebijakannya terhadap konflik Suriah.

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 248-250.

Dalam kajian penelitian kualitatif, penelitian ini dapat menjelaskan dan menafsirkan fakta-fakta dalam interaksi sosial. Melalui fakta dan realitas, penelitian kualitatif akan menghasilkan penelitian yang terfokus. Teori sebagai pisau analisis menjadi tumpuan penulis untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk dapat menggambarkan realita yang terjadi. Fakta tersebut digunakan untuk mendeskripsikan respon Iran dalam pada konflik di Suriah.<sup>26</sup>

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan studi kepustakaan dalam menyusun penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang berupa dokumen, artikel, jurnal, berita dan wawancara dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas dokumen-dokumen sebagai data penelitian menjadi salah satu poin penting dalam penelitian studi kepustakaan ini. Dokumen tersebut bersifat publik dan dapat diakses oleh siapapun yang membutuhkan.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Bab satu membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dengan pembagian deskripsi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah yang berisikan pertanyaan penelitian, Kemudian terdapat kajian literatur sebagai perbandingan posisi penulis dengan penelitian-penelitian yang ditemukan penulis, kerangka pemikiran sebagai landasan teori untuk menganalisa permasalahan, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang terbagi dalam

---

<sup>26</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Second Edition*, (California: SAGE Publications, Inc., 2014).

metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan, serta sistematika pembahasan.

Pada bab dua penulis akan memaparkan kepentingan-kepentingan Iran di Timur Tengah, dilanjutkan mengenai kepentingan Iran pada konflik di Suriah. Kepentingan Iran dibatasi oleh kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan internasional dan ideologi. Selain itu, penulis juga mendeskripsikan mengenai konflik di Suriah.

Pada bab tiga, penulis berusaha mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil Iran untuk mencapai kepentingannya dalam konflik di Suriah. Bab tiga menjadi jawaban penulis atas pertanyaan penelitian yang mendasari penelitian penulis.

Pada bab terakhir, bab empat, penulis memaparkan kesimpulan dari analisa penelitian ini dengan menjawab pertanyaan penelitian penulis.